

PENGARUH KUALITAS PELATIHAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Kadek Ayu Indrayani¹, Desak Nyoman Werastuti²

¹²Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

¹e-mail: ayuindrayani53@gmail.com, ²sri.werastuti@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Populasi pada penelitian ini yaitu perangkat desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan se-Kabupaten Buleleng dengan jumlah total 387 perangkat desa. Adapun metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 197 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program *SPSS 24.0 for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa; (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa; (3) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Kata kunci : kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, keterandalan pelaporan keuangan

Abstract

This study aims to determine the effect of training quality, use of information technology, and organizational commitment to the reliability of village government financial reporting. This study uses a quantitative approach using a questionnaire which is measured using a Likert scale. The population in this study were village officials consisting of the Village Head, Village Secretary, and Head of Financial Affairs in Buleleng Regency with a total of 387 village officials. The sampling method in this study is simple random sampling technique with a total sample of 197 respondents. The data analysis technique in this study used multiple linear regression with the help of the SPSS 24.0 for Windows program. The results of this study indicate that: (1) the quality of training has a positive effect on the reliability of village government financial reporting; (2) the use of information technology has a positive effect on the reliability of village government financial reporting; (3) organizational commitment has a positive effect on the reliability of village government financial reporting.

Keywords: *quality of training, utilization of information technology, organizational commitment, reliability of financial reporting*

1. Pendahuluan

Saat ini pembangunan desa telah menjadi prioritas pemerintah pusat yang terlihat dari alokasi anggaran dana desa selalu meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya alokasi dana desa tersebut membuat dalam pengelolaannya menjadi sorotan dari banyak pihak, terlebih di era demokrasi ini, menguatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan sehingga dorongan untuk melakukan akuntabilitas semakin tinggi. Akuntabilitas

sendiri berarti sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas organisasi dalam mencapai misi dan tujuan dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara periodik.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting dijadikan sebagai dasar

dalam pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus dapat diandalkan. Keterandalan merupakan suatu kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang tersedia valid atau benar (Meutia & Amar, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keterandalan adalah salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi, yakni informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, bersifat netralitas, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Oleh karena itu, dalam pelaporan keuangan pemerintah desa, perangkat desa harus bisa menyajikan informasi yang andal agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan.

Keterandalan pelaporan keuangan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah karena meskipun informasi yang disajikan mungkin relevan, namun apabila dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut juga dapat menyesatkan. Sebaliknya, apabila informasi yang tersaji memenuhi karakteristik andal maka akan relevan digunakan dalam pengambilan keputusan.

. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2015-

2020 terdapat 676 kasus penyelewengan dana desa dengan menimbulkan kerugian negara total Rp 111 miliar (Kompas.com, 2021). Bahkan pada tahun 2019, ICW mencatat kasus penyelewengan dana desa menjadi kasus terbanyak yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yakni sebanyak 46 dari 271 kasus sepanjang tahun 2019 dengan kerugian negara mencapai 32,3 miliar. Menurut aktivis ICW yakni Egi Primayogha menyatakan bahwa salah satu modus yang ditemukan adalah adanya laporan fiktif dengan menimbulkan kerugian negara total mencapai Rp 111 miliar. Masih banyaknya kasus penyelewengan dana desa yang berkaitan dengan pelaporan keuangan fiktif di pemerintahan desa ini mengindikasikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh pemerintah desa masih belum dapat diandalkan bagi pengguna laporan keuangan. Apalagi saat ini alokasi dana desa cukup besar sehingga tanggung jawab dan resiko dalam mengelola dana tersebut juga semakin besar.

Provinsi Bali sendiri memiliki banyak desa yang mendapat kucuran dana desa terutama Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten terluas dengan desa terbanyak yang menerima alokasi dana desa di Provinsi Bali.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dana Desa (Dalam Ribuan Rupiah)		
			2018	2019	2020
1.	Badung	46	42.439.283	52.584.767	56.217.010
2.	Bangli	68	52.826.236	61.334.645	63.492.227
3.	Buleleng	129	106.882.607	124.026.738	127.185.229
4.	Gianyar	64	51.971.543	59.992.299	62.324.665
5.	Jembrana	41	39.664.910	49.043.178	52.061.098
6.	Klungkung	75	64.376.212	78.718.974	82.614.181
7.	Karangasem	53	43.266.021	51.533.982	54.067.541
8.	Tabanan	133	102.310.276	118.204.542	122.922.870
9.	Denpasar	21	27.404.975	34.750.461	36.913.390

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Dari Tabel 1 dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi dana desa yang paling banyak

dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Semakin besar jumlah dana desa, maka dalam

penyusunan APB Desa semakin rentan terhadap modus laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang dan *mark up* anggaran (Christiawan, 2018). Hal ini pun terjadi di Kabupaten Buleleng, dimana terdapat ketidakpatuhan dalam membuat laporan keuangan oleh pemerintah desa. Dikutip dari balipuspanews.com, pada tahun 2019, terdapat 29 dari 129 desa di Kabupaten Buleleng tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk tahap I dan II.

Selain itu, di Kabupaten Buleleng juga masih terdapat kasus penyimpangan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang diterima. Di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar terdapat beberapa kasus yang terjadi, yaitu terdapat anggaran *finishing* Kantor Desa pada tahun 2015 sebesar Rp 95.644.560, namun kenyataannya sampai tahun 2019 tidak ada kegiatan *finishing* Kantor Desa. Tidak hanya itu, terdapat juga penyelewengan pada laporan pertanggungjawaban APB Desa tahun 2017 yang menyebut dilakukan pembangunan jalan Suli sebesar Rp 93.416.500, padahal pembangunan jalan tersebut telah dilakukan tahun 2016 (Bali Editor, 2019).

Selanjutnya pada tahun 2019, perbekel Desa Banjar menyelewengkan Dana Bantuan Khusus (BKK) sebesar Rp 1,65 miliar untuk kepentingan diluar proposal serta tidak menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara Desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara (Kumparan, 2019). Kemudian, terdapat juga di Desa Tigawasa dimana terdapat pelaporan keuangan fiktif untuk tahun anggaran 2019 oleh pelaksana kegiatan anggaran yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 1 miliar lebih (Nusabali, 2020). Bahkan sampai saat ini belum ada kejelasan penyelidikan terkait kasus tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, yang pertama yaitu kualitas pelatihan (Noviyantini & Devi, 2020). Pelatihan

merupakan sebuah proses pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pegawai dalam menghadapi pekerjaan di organisasinya. Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah (*steward*) wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat (prinsipal) yakni dengan mengungkapkan segala informasi akuntansi secara andal, jelas, dan rinci di dalam laporan keuangan mengingat laporan keuangan sangat penting digunakan oleh prinsipal dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal maka tentunya pemerintah (*steward*) perlu mendapatkan kualitas pelatihan yang memadai.

Penelitian mengenai kualitas pelatihan pernah diteliti oleh Dodopo et al. (2017) dan Noviyantini dan Devi (2020) yang menemukan bukti empiris bahwa kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian Hendiantoro (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelatihan tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

H₁: Kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu pemanfaatan teknologi informasi (Sugandi et al., 2014). Menurut *stewardship theory*, pemerintah selaku *steward* memiliki kewajiban untuk mengungkapkan segala informasi secara andal, jujur, jelas, dan rinci di dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah (*steward*) atas pengelolaan keuangan kepada prinsipal. Tentunya, untuk mendapatkan laporan keuangan yang andal perlu didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi yang sudah semakin canggih. Penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi, akan membuat

pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat dalam perhitungan, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya nilai informasinya (Wihariyanti & Handayani, 2018).

Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pernah diteliti oleh Sugandi et al. (2014), Putri et al. (2016), Ratnasari et al. (2016) dan Kombong (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sementara, dalam penelitian Wardani dan Andriyani (2017), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Komitmen organisasi juga dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah (Sugandi et al., 2014). Menurut Soekidjan (dalam Andrianto, 2017), komitmen merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyalurkan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Menurut *stewardship theory*, pemerintah (*steward*) bekerja tidak termotivasi akan tujuan-tujuan individu melainkan bekerja untuk kepentingan bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Asumsi penting dari *stewardship theory* ini adalah pemerintah (*steward*) akan meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan prinsipal. Sehingga, perlu adanya sebuah komitmen dari pemerintah terhadap organisasinya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah (*steward*), maka akan dapat menumbuhkan kemauan bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi yang salah satunya yaitu dapat menyusun laporan keuangan andal.

Penelitian mengenai komitmen organisasi pernah dilakukan oleh Sugandi et al. (2014), Putri et al. (2016), Sari (2017), dan Dodopo et al. (2017) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Ratnasari et al. (2016) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Adapun variabel yang digunakan yaitu kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan se-Kabupaten Buleleng selaku aparatur inti yang terlibat dalam pelaporan keuangan dengan jumlah total 387 perangkat desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teknik simple random sampling* (sampling acak sederhana) yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak sederhana dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama besar untuk dijadikan sampel. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin sebanyak 197 orang.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung untuk menyerahkan ataupun mengambil kembali kuesioner agar dapat dilakukan pengolahan data. Kuesioner yang diberikan terdiri dari beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator setiap variabel yang akan disebarakan secara langsung ke

masing-masing desa di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan tertutup, dimana responden menjawab setiap pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala *likert*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) analisis statistik deskriptif; (2) pengujian kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas; (3) pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas; (4) pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t.

3. Hasil dan Pembahasan

Jumlah kuesioner yang disebarakan setara dengan jumlah angket yang kembali yaitu sejumlah 197 kuesioner atau 100%. Seluruh kuesioner yang diterima tidak ada yang cacat dan telah diisi secara lengkap oleh responden, sehingga kuesioner bisa diolah semua yaitu berjumlah 197 kuesioner atau 100%. Kuesioner terdiri dari 26 butir pernyataan yang terdiri dari 6 butir pernyataan untuk variabel keterandalan pelaporan keuangan (Y), 6 butir pernyataan untuk variabel kualitas pelatihan (X_1), 6 butir pernyataan untuk pemanfaatan teknologi informasi (X_2), dan 8 butir pernyataan untuk variabel komitmen organisasi (X_3).

Adapun profil responden dalam penelitian ini yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa kerja. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu 148 responden laki-laki (75,13%) dan 49 responden perempuan (24,87%). Berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 109 responden (55,33%), pendidikan terakhir D3 sebanyak 11 responden (5,58%), pendidikan terakhir S1 sebanyak 72 responden (33,55%), dan pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 responden (2,54%). Selanjutnya berdasarkan jabatan responden menunjukkan bahwa 66 responden memiliki jabatan Kepala Desa (33,50%), 65 responden memiliki jabatan Sekretaris Desa (33,00%), dan 66

responden memiliki jabatan Kaur Keuangan Desa (33,50%). Kemudian berdasarkan masa kerja responden, yakni 3 responden memiliki masa kerja < 1 tahun (1,52%), 28 responden memiliki masa kerja 1-2 tahun (14,21%), 59 responden memiliki masa kerja 2-5 tahun (29,95%), 46 responden memiliki masa kerja 5-10 tahun (23,35%), dan 61 responden memiliki masa kerja > 10 tahun (30,97%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja 2-5 tahun.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kualitas pelatihan (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 3,17 dan nilai maksimum 5,00, serta nilai rata 3,7 dengan standar deviasi 0,53. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) memiliki nilai minimum 3,33 dan nilai maksimum 5,00, serta nilai rata-rata 4,21 dengan standar deviasi 0,45. Variabel komitmen organisasi (X_3) memiliki nilai minimum 3,50 dan nilai maksimum 5,00 serta skor rata-rata 4,38 dengan standar deviasi 0,39. Variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa (Y) memiliki nilai minimum 3,33 dan nilai maksimum 4,83 serta skor rata-rata 4,18 dengan standar deviasi 0,36.

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner yang digunakan (Ghozali, 2011). Uji validitas dilakukan setiap butir pertanyaan pada kuesioner dengan menggunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Corelated Item-Total* atau membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dibantu melalui program *SPSS 24.0 for Windows*. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (Ghozali, 2011). Hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} untuk semua item lebih besar dari $r_{tabel} = 0,140$ sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa dinyatakan valid.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi perolehan jawaban responden. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa adalah reliabel.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji normalitas data dilakukan pada *unstandardized residual* pengaruh kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 2, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		197
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std. Deviation</i>	1,08793036
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,063
	<i>Positive</i>	0,036
	<i>Negative</i>	-0,063
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,063
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,058

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2. ditunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,058. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik *Kolmogorov-Smirnov Z*. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil Uji Multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 3, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Kualitas pelatihan	0,755	1,324	Tidak ada multikolinieritas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,61	1,64	Tidak ada multikolinieritas
Komitmen organisasi	0,766	1,305	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang

lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*. Pada penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	X ₁	0,025	0,016	0,127	1,546	0,124
	X ₂	-0,025	0,021	-0,112	-1,223	0,223
	X ₃	-0,009	0,016	-0,044	-0,545	0,586

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *absolute residual* (ABS) lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu apabila variabel lain berubah (Sugiyono, 2013). Analisis ini dapat dilakukan apabila uji asumsi klasik telah dilakukan dan memenuhi syarat,

yakni sebaran data telah terdistribusi normal, di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi linier, dan model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis konstanta dan koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta serta hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Beta dan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,412	0,974		2,477	0,014
	X ₁	0,155	0,028	0,231	5,478	0
	X ₂	0,253	0,037	0,321	6,845	0
	X ₃	0,368	0,029	0,537	12,813	0

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2021

Keterangan: X₁ = kualitas pelatihan, X₂ = pemanfaatan teknologi informasi, X₃ = komitmen organisasi, dan Y = keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa

Berdasarkan Tabel 5. didapatkan hasil persamaan regresi seperti berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

(1)

$$Y = 2,412 + 0,155X_1 + 0,253X_2 + 0,368X_3 + \varepsilon$$

Adapun penjelasan dari persamaan diatas yaitu sebagai berikut.

Konstanta 2,412 menunjukkan bahwa

apabila variabel X₁, X₂, X₃ bernilai konstan, maka variabel Y memiliki nilai positif 2,412 satuan. X₁ memiliki koefisien regresi 0,155. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa X₁ mempunyai pengaruh positif terhadap Y. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan X₁ dapat meningkatkan Y sebesar 0,155 satuan dengan asumsi

variabel independen yang lainnya tetap. X_2 memiliki koefisien regresi 0,253. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa X_2 berpengaruh positif terhadap Y . Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan X_2 dapat meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa (Y) sebesar 0,253 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. X_3 memiliki koefisien regresi 0,368. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa X_3 berpengaruh positif Y . Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan X_3 dapat meningkatkan Y sebesar 0,368 satuan dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Pada penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R Square* karena dalam *Adjusted R Square* adalah koefisien determinasi yang disesuaikan untuk regresi yang menggunakan 3 atau lebih variabel independen dan dapat digunakan untuk mengevaluasi model regresi mana yang terbaik (Ghozali, 2013). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Mode	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,861	0,741	0,737

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6. diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,737. Hal ini menunjukkan bahwa 73,7% variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa dipengaruhi oleh variabel kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan

komitmen organisasi, sedangkan 26,3% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji t digunakan untuk menentukan analisis pengaruh kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa secara parsial, dimana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji t. Dari Tabel 5. dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelatihan (X_1) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 diterima. Variabel komitmen organisasi (X_3) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelatihan (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), dan komitmen organisasi (X_3) secara parsial berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa (Y).

Pengaruh Kualitas Pelatihan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh kualitas pelatihan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,155 satuan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, sehingga **H_1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Jika kualitas pelatihan semakin tinggi, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa juga semakin tinggi.

Pelatihan merupakan sebuah proses pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang sehingga mampu berkompeten dalam menghasapi pekerjaan di dalam organisasinya (Muzahid, 2014). Pelatihan dapat membantu para pegawai untuk menguasai keterampilan khusus serta dapat membantu memperbaiki kekurangan saat melaksanakan pekerjaan karena di dalamnya berisikan pengajaran bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan,

seperti bagaimana cara penatausahaan dan menyusun laporan keuangan yang baik dan benar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *stewardship theory* yang dikemukakan Donaldo dan Davis (dalam Asnida & Aprila, 2018), dimana pemerintah sebagai *steward* memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat selaku prinsipal yaitu dengan mengungkapkan segala informasi akuntansi secara andal, jelas, dan rinci di dalam laporan keuangan. *Stewardship theory* juga memandang bahwa pemerintah akan bekerja secara maksimal dan mengutamakan tujuan organisasi dibandingkan tujuan-tujuan individu atau kepentingan pribadi. Sehingga, agar dapat mencapai tujuan organisasi yakni dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, maka dibutuhkan pelatihan yang memadai oleh aparatur pemerintah (*steward*). Dengan adanya pelatihan maka akan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil, berkualitas dan berkompeten dalam membuat laporan keuangan.

Hasil riset ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dodopo et al. (2017) dan Noviyantini dan Devi (2020), yang menemukan bukti empiris bahwa kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,253 satuan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, sehingga **H₂ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Jika pemanfaatan teknologi informasi semakin tinggi, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa juga semakin tinggi.

Pemanfaatan teknologi informasi berupa komputer dan jaringan dapat mempermudah serta mempercepat dalam pemrosesan pengolahan data transaksi serta perhitungannya pun menjadi lebih akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya nilai informasinya. Teknologi informasi bukan sekedar penggunaan komputer untuk memproses dan menyimpan informasi saja tetapi juga sebagai teknologi komunikasi untuk memudahkan dalam mengirimkan informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory* yang dikemukakan Donaldo dan Davis (dalam Asnida & Aprila, 2018), yaitu pemerintah sebagai *steward* mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan segala informasi secara andal, jujur, jelas, dan rinci di dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan kepada prinsipal. Sehingga, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, dalam penyajian laporan keuangan perlu didukung oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi yang sudah semakin canggih. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan membantu pemerintah dalam mengolah data transaksi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal yang sesuai dengan peraturan. Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan media yang dapat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan membantu pelaporan keuangan yang terbuka dan jujur.

Kajian empirik yang turut mendukung hasil temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugandi et al. (2014), Ratnasari et al. (2016) dan Kombong (2017), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa menunjukkan nilai koefisien regresi 0,368 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 sehingga **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Jika komitmen organisasi semakin tinggi, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa juga semakin tinggi.

Komitmen organisasi merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Adanya komitmen yang tinggi akan membuat seseorang tetap bertahan di dalam organisasi dan akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya serta menunjukkan dedikasinya terhadap organisasi. Komitmen organisasi ini menunjukkan adanya keyakinan diri seseorang terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, adanya kerelaan dalam melakukan usaha secara sungguh-sungguh untuk kepentingan organisasi, dan adanya sebuah keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *stewardship theory*, dikemukakan Donaldo dan Davis (dalam Asnida & Aprila, 2018), yaitu pemerintah sebagai *steward* bertindak tidak termotivasi akan tujuan-tujuan individu melainkan bekerja untuk kepentingan bersama demi tercapainya tujuan organisasi. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara *steward* dengan prinsipal, pihak *steward* akan berusaha untuk bekerja sama dan menyelaraskan tujuan untuk kepentingan bersama sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Sehingga, untuk dapat tercapainya tujuan organisasi maka perlu adanya sebuah komitmen dari pemerintah dalam bekerja di organisasinya. Dengan adanya sebuah komitmen organisasi, maka pemerintah akan menunjukkan

kinerja yang maksimal dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Salah satunya yaitu dapat menyajikan laporan keuangan yang andal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan.

Hasil riset ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugandi et al. (2014), Putri et al. (2016), Sari (2017) dan Dodopo et al. (2017), yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,124 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$; (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,264 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$; (3) Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,383 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Terdapat beberapa saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, perlu diperhatikan terkait kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi, sehingga penyusunan laporan keuangan semakin efektif dan dapat dikontrol dengan baik. Hal ini diharapkan menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa yang memiliki informasi akurat, terpercaya, tepat waktu dan relevan. (2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,721, artinya

variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa dipengaruhi oleh variabel kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi sebesar 72,1%, sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, seperti keterlibatan pemakai, ukuran organisasi, dan keahlian pemakai. Selain itu juga disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah pemerintah desa tidak hanya yang berada di Kabupaten Buleleng saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

Daftar Rujukan

- Andrianto, E. (2017). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Suatu Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>
- Asnida, N., & Aprila, N. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. 8, 213–224.
- Bali Editor.2019."Diduga Terjadi Penyalahgunaan Dana APBDes Rp 1 M di Desa Tirtasari". Tersedia pada <https://balieditor.com/diduga-terjadipenyalahgunaan-dana-apbdes-hampir-rp-1-m-di-desa-tirtasari/>. Diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Christiawan, W. (2018). Analisa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(28), 131–148.
- Dodopo, Y., Sondakh, J., & Tinangon, J. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, Dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 22–31. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15306>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi multivariate dengan program IBM SPSS 19. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In *Information Technology* (Vol. 2, Issue 2).
- Hendiantoro. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara)* [Universitas Muhammadiyah Palembang]. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5668>
- Kombong, R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. In *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Kompas.2021."ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat". Tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>. Diakses tanggal 27 Maret 2021.
- Kumparan.2019."3 Kasus Korupsi di Buleleng dan Denpasar Disidik Kejati Bali". Tersedia pada

- <https://kumparan.com/kanalbali/3-kasus-korupsi-di-buleleng-dan-denpasar-disidik-kejati-bali-1sPbem8q342>. Diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Meutia, R., & Amar, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 155–169. <http://repository.unissula.ac.id/6485/>
- Muzahid, M. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Suatu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 57–71. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/nod/e/150>
- Noviyantini, N. P., & Devi, S. (2020). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, dan Kualitas Pelatihan terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 224. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25595>
- NusaBali.2020."Puluhan Warga Tigawasa Datangi Polres Buleleng Desak Tuntaskan Dugaan Penyelewengan Dana Desa". Tersedia pada <https://www.nusabali.com/berita/77414/puluhan-warga-tigawasa-kembali-datangi-polres-buleleng>. Diakses tanggal 10 Februari 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Putri, N. K. A. W., Yuniarta, G. A., & Atmadja, A. T. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Keuangan terhadap Keterandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v4i1.6663>
- Ratnasari, R., Adel, J. F., & Iranita. (2016). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Teknologi Informasi , dan Komitmen Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Studi Pada DPPKD , BAPPEDA dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan)*.
- Sari, P. N. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugandi, J., Desmiyawati, & Hanif, R. A. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD se-Kabupaten Kuansing). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JUMFEKOM)*, 1, 1–15.
- Sugiyono. (2013). *Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. In *Bandung: Alfabeta*.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Wihariyanti, I. A., & Handayani, N. (2018). Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7).